

# IMIGRAN GELAP DI INDONESIA: MASALAH DAN PENANGANAN

Poltak Partogi Nainggolan<sup>1</sup>

## Abstract

*The end of containment policy and the Cold War changes global security situation, in which transnational crimes emerge as a new security threat. The rising flow of a large number of illegal immigrants who attempted to use Indonesia either as a transit or a destination country has drawn the attention of the government and the parliament of the country to properly respond it, thus, the new threat will not damage its national security. This research reveals different cases of people smuggling using Indonesia's territory. The writer discloses the background and the motivation of the actors as well as the politics of the government in coping with the cases.*

Kata Kunci: Imigran Gelap, *People Smuggling*, *Illegal Trafficking in Persons*, *Transnational Organized Crimes*.

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Masalah imigran gelap sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas-negara (transnasional) memperoleh perhatian serius DPR sebagai pusat legislasi nasional. Ini dapat dilihat dari disusun dan dibahasnya sejak tahun 2008 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keimigrasian dan RUU tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Suplemen Konvensi PBB Melawan *Transnational Organized Crimes*). Selain itu, DPR telah mensahkan UU No. 43/2008 tentang Wilayah Negara dan UU No. 35/2009 tentang Narkotika yang terkait kepentingan mencegah kejahatan transnasional lebih banyak lagi, yang implementasinya harus diawasi DPR.

---

<sup>1</sup> Penulis adalah Peneliti Utama Masalah-masalah Hubungan Internasional di Pusat Pengkajian dan Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPRRI.

Di fora internasional, PBB telah mengeluarkan konvensi terkait masalah imigran gelap, yakni *UN Convention Against Transnational Organized Crime*.<sup>2</sup> Di samping itu, terdapat dua protokol tambahannya, yakni *the Protocols Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air* dan *the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*.<sup>3</sup>

Protokol pertama khusus dirancang memotong pergerakan orang secara illegal melalui berbagai perbatasan internasional. Protokol itu akan memantapkan berbagai persetujuan internasional untuk kerja sama penegakan hukum mencegah penyelundupan manusia. Ia juga berperan dalam melindungi hak kaum migran yang diselundupkan.<sup>4</sup> Ruang lingkup protokol meliputi upaya penyelidikan dan penuntutan tindak pidana yang bersifat transnasional dan melibatkan kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi. Secara khusus, Pasal 5 protokol melindungi mereka yang menjadi korban karena mereka tidak bisa dikenai tanggung jawab tuntutan pidana karena mereka obyek dari tindak pidana yang ditetapkan protokol tersebut.

Di berbagai negara kasus imigran gelap terus terjadi, mulai dari Angola, China, dan India hingga Rusia, Inggris dan AS, dengan angka dan alasan yang beragam. Di Angola, pada tahun 2007 terdapat 400 ribu imigran gelap asal Kongo, yang semuanya sudah dipulangkan.<sup>5</sup> Di Cina, sekalipun tidak diperoleh jumlah yang pasti, para imigran gelap asal Korea Utara dan Mongolia terus mengalir. Hal serupa terjadi di India, yang terus terancam imigran gelap asal Bangladesh akibat garis perbatasannya yang panjang. Sementara, di Rusia, angka imigran gelap begitu mencengangkan, mencapai 10-12 juta orang, dengan jumlah 200 ribu orang yang masuk setiap tahunnya dari bekas bagian propinsinya.<sup>6</sup> Di Inggris, yang jauh lebih maju secara ekonomi dan stabil secara politik, ada sekitar 500 sampai 700 ribu imigran illegal.<sup>7</sup> Di AS, negeri yang termaju, terdapat antara 12 hingga 20 juta imigran gelap, yang mayoritas berasal dari Amerika Latin.<sup>8</sup>

---

<sup>2</sup> Marsha Mildon, "New UN protocols against organized crime and illegal immigrants", *Law-Now*, [http:// www.highbeam.com/doc/1G1.30066003.ht-m1:1](http://www.highbeam.com/doc/1G1.30066003.ht-m1:1), 1 Februari 2001: 1.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> "Dewan Setujui Protokol Menentang Penyelundupan," *Kompas*, 18 Februari 2009: 2.

<sup>5</sup> Lihat, "Illegal Immigrants by Region", *Wikipedia*, [http://en.wikipedia.org/wiki/Illegal\\_immigrants](http://en.wikipedia.org/wiki/Illegal_immigrants), 13 Februari 2009: 7.

<sup>6</sup> *Ibid.*: 9-10.

<sup>7</sup> *Ibid.*: 10-11.

<sup>8</sup> *Ibid.*: 11.

## B. Permasalahan dan Pertanyaan Penelitian

Dalam beberapa tahun ini arus imigran gelap menimbulkan keprihatinan global. Negara maju melalui lembaga internasional telah mengampanyekan perlunya pengesahan protokol untuk menghukum mereka yang terlibat, termasuk yang berdampak pada penyelundupan manusia terutama kelompok perempuan dan anak.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sangat rawan terhadap berbagai bentuk tindak kejahatan imigran gelap. Posisi Indonesia dengan daratan yang luas dan garis pantai yang panjang menyebabkan wilayahnya sulit diawasi dari masuknya imigran gelap asal berbagai negara, terutama dari laut. Para imigran gelap ini bisa masuk melalui wilayah-wilayah perbatasan, baik pintu imigrasi atau akses resmi dan apa yang disebut sebagai "jalan-jalan tikus" yang tidak terkontrol, yang begitu banyak terdapat di sepanjang perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga.

Krisis ekonomi, merosotnya tingkat kesejahteraan dan keamanan di banyak negara, dan bertambahnya angka kemiskinan serta globalisasi dan akses informasi memudahkan berlangsungnya kasus-kasus imigran gelap. Terbatasnya pengamanan perbatasan laut Indonesia merawankan masuknya imigran gelap ke negara kepulauan yang luas ini. Karena itu, masuknya imigran gelap akan menjadi persoalan esensial di Indonesia, bukan saja bagi negara-negara maju, karena beban ekonomi dan dampak keamanan yang diakibatkannya.

Sebagai konsekuensinya, perlu diketahui melalui penelitian karakteristik masalah dan penanganan kasus-kasus imigran gelap di Indonesia. Dengan demikian, dapat diketahui dengan jelas motivasi imigran gelap ke negeri ini dan menjadikannya sebagai negara tujuan (*country of destination*) ataupun sekedar tempat transit. Melalui penelitian juga akan diketahui *country of origin* atau dari negara mana saja para imigran gelap itu berasal dan mengapa mereka harus melakukan kegiatan yang beresiko tinggi ini. Sehingga diharapkan, Indonesia yang menjadi sasaran berbagai kegiatan imigran gelap dapat secara efektif meresponsnya, dan arus imigran gelap di masa depan dapat dikurangi, dan, bahkan, dihentikan.

Beberapa pertanyaan utama yang diturunkan dari permasalahan di atas untuk penelitian ini adalah:

1. Dari dan ke negara mana saja para imigran gelap berasal dan pergi, dan pihak yang terlibat dalam pengiriman mereka ke negara transit dan tujuan?
2. Apa motivasi atau berbagai faktor yang menyebabkan mereka melakukan kegiatan tersebut?
3. Bagaimana respons dan solusi yang dilakukan pemerintah di negara transit dan tujuan?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan memberikan masukan bagi Komisi 1 untuk rapat-rapat kerja pengawasan pelaksanaan berbagai UU terkait yang baru saja disahkan DPR. Yang lebih penting, hasil penelitian akan dikontribusikan bagi pembahasan RUU ratifikasi konvensi PBB mengenai mengenai kejahatan transnasional terorganisasi, seperti penyelundupan manusia (*people smuggling*) dan perdagangan manusia (*illegal human trafficking in persons*), yang merupakan suplemen konvensi PBB melawan kejahatan transnasional.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti, baik dalam bentuk data maupun argumentasi, untuk pembuatan RUU mengenai kelautan, yang termasuk prioritas dalam Prolegnas 2009.

### D. Kerangka Pemikiran

Dalam studi hubungan internasional, masalah imigran gelap dan juga penyelundupan manusia dikategorikan sebagai isu-isu lunak (*soft issues*). Ini membedakannya dari isu-isu keras (*hard issues*) seperti masalah perang antar-negara, peningkatan anggaran pertahanan, perlombaan senjata dan pengembangan senjata nuklir. Walaupun demikian, bukan berarti masalah imigran gelap dan penyelundupan manusia merupakan hal yang tidak serius dihadapi banyak negara, apalagi negara maju, dan tidak merupakan ancaman bagi keamanan nasional mereka. Sebab, di pintu masuk berbagai negara, seperti bandara dan pelabuhan laut, pihak imigrasi memasang peringatan ancaman kegiatan tersebut dan besarnya dampak yang ditimbulkan bagi korban, dan mereka yang terlibat, maupun negara transit dan tujuan.

Dari perspektif keamanan, analisis keamanan mengantisipasi dampak besar yang dapat ditimbulkan kegiatan imigran gelap karena hubungannya dengan kecenderungan peningkatan terorisme internasional yang dilakukan para aktor non-negara (*non-state actors*) di berbagai belahan dunia. Para aktor non-

negara ini dapat memanfaatkan jalur resmi maupun tidak resmi untuk masuk ke suatu negara dengan memanipulasi identitas mereka. Sebagai alternatif, jika gagal dengan *modus operandi* ini, mereka memanfaatkan akses pengungsi dan calon peminta suaka, yang jika di negara transit dan tujuan tidak terdapat prosedur pemeriksaan yang ketat, akan mendukung tingkat keberhasilan mereka. Selanjutnya, jika mereka lolos pemeriksaan petugas imigrasi dan keamanan, serta tidak diawasi lebih lanjut, dapat membaaur dengan masyarakat untuk kemudian melanjutkan kegiatan mereka dan mencapai sasaran yang sebenarnya. Sehingga, jalur imigran gelap dan penyelundupan manusia secara tidak langsung dapat menimbulkan ancaman keamanan nasional bagi suatu negara.

Dari perspektif lain, sejalan dengan semakin beragam dan canggihnya ancaman keamanan jenis baru dan majunya analisis studi hubungan internasional dan studi keamanan dan pertahanan, para analis melihat dampaknya lebih jauh terhadap keamanan ekonomi yang dihadapi negara yang menanggung resikonya, sebagai negara transit maupun tujuan. Secara lebih jelas, para analis telah mengkaji relevansinya dengan semakin berat beban ekonomi dan keuangan yang harus ditanggung pemerintah negara transit dan tujuan untuk menangani para imigran gelap tersebut. Hal ini mencakup penyediaan makanan dan akomodasi sehari-hari mereka setelah tertangkap dan menjadi tahanan karantina. Dengan pintu masuk yang banyak, apalagi untuk sebuah negara kepulauan yang luas, resiko ekonominya jauh lebih berat, termasuk untuk memulangkan kembali mereka melalui prosedur deportasi maupun untuk mempersiapkan keberangkatan dan mengirim mereka ke negara tujuan. Inilah yang disebut dengan ancaman ekonomi yang dihasilkan kegiatan imigran gelap.

Bersama-sama dengan kemiskinan, keterbatasan akses pada pangan, degradasi lingkungan hidup, dan penyakit menular, imigran gelap dan penyelundupan manusia menciptakan ancaman ekonomi dan sosial, yang disebut sebagai ancaman non-tradisional.<sup>9</sup> Dikaitkan dengan cenderung meningkatnya terorisme internasional di kawasan, yakni kawasan Asia Tenggara, khususnya wilayah Indonesia, yang ditengarai sebagai tempat berkembang biak (*safe haven*) kejahatan kemanusiaan transnasional tersebut, masalah imigran gelap dan penyelundupan manusia menjadi kian diperhatikan perkembangannya oleh pemerintah atau aparat keamanan negara-negara di kawasan. Sedangkan ancaman oleh organisasi kejahatan transnasional dalam bidang narkoba dan

---

<sup>9</sup> Anak Agung Banyu Perwita, "Keamanan Nontradisional", *Kompas*, 13 Februari 2009: 7.

*illegal human trafficking* atau *illicit trafficking in persons* itu sendiri belakangan meningkat di beberapa negara anggota ASEAN. Selanjutnya, sebagai salah satu bentuk ancaman nontradisional, imigran gelap dan penyelundupan manusia tidak mengenal lagi batas-batas negara, memiliki keterkaitan antara aspek militer dan non-militer, dan harus diatasi secara simultan dalam lingkup nasional, regional, dan global.<sup>10</sup>

Secara spesifik, antara terminologi imigran gelap dan penyelundupan manusia ada sedikit perbedaan, walaupun keduanya sama-sama merupakan bentuk kejahatan transnasional masuknya orang ke suatu negara dari lain negara secara ilegal. Perbedaannya, dalam kasus imigran gelap, pelaku dan kegiatannya lebih terbatas, serta inisiatifnya datang dari mereka yang menjadi imigran gelap (pihak pertama) dan motifnya cenderung (tidak aman secara) politik. Sementara, dalam kasus penyelundupan manusia, pelaku dan kegiatannya lebih luas atau kompleks, serta inisiatifnya berasal dari pihak ketiga yang secara sengaja mencari keuntungan finansial, dan motifnya cenderung (tidak aman secara) ekonomi.

Penyebab kegiatan imigrasi gelap adalah perang atau konflik bersenjata berkepanjangan di negara asal, yang menimbulkan kekhawatiran atas nasib dan masa depan pelakunya.<sup>11</sup> Kebanyakan mereka melarikan diri dari represi dan berbagai kebijakan melanggar hak asasi manusia (HAM) rejim yang berkuasa. Hal ini menjadi motif politik mereka yang melakukannya di banyak negara terbelakang. Selanjutnya, masalah utama orang melakukan kegiatan imigrasi gelap adalah kemiskinan yang mereka hadapi di negara asal.<sup>12</sup> Mereka masuk secara ilegal ke negara lain yang jauh lebih baik kondisinya untuk mencari penghidupan atau pekerjaan yang lebih layak. Para imigran gelap masuk ke negeri lain karena jumlah penduduk meningkat pesat di negeri asal, sehingga kian terbatas sumber daya alam dan ekonomi yang dapat dinikmati.<sup>13</sup>

*Modus operandi* para imigran gelap beragam.<sup>14</sup> Pertama, masuk melalui pintu resmi dan tidak resmi di perbatasan dan menggunakan negara transit (negara ketiga). Ada pula yang memanfaatkan berakhirnya visa dan paspor mereka dan mencari pihak ketiga yang dapat membantu pembuatan secara ilegal untuk mendapatkan visa dan paspor baru dalam waktu tidak lama.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Lihat kembali, "Illegal Immigrants by Region", *Wikipedia*, 13 Februari 2009 *ibid.*: 2.

<sup>12</sup> *Ibid.*: 3.

<sup>13</sup> *Ibid.*: 3-4.

<sup>14</sup> Mildon, 2001, *loc. cit.*: 4-7.

Sebagai kejahatan, kegiatan imigran gelap sering kali dilakukan secara terorganisasi sehingga membutuhkan pendekatan komprehensif melalui kerja sama antarnegara melalui pertukaran informasi dan upaya lain di tingkat internasional. Di tingkat nasional dibutuhkan Undang-undang di setiap negara yang telah meratifikasi protokol dan konvensi PBB. Di Indonesia, penyampaian RUU terkait menunjukkan komitmen Indonesia atas pemberantasan penyelundupan manusia, dalam upaya meningkatkan citra di mata internasional.<sup>15</sup>

## II. METODOLOGI PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang berupaya memaparkan dan menganalisis permasalahan, penyebab, motivasi, dan solusi yang diambil pemerintah berbagai negara dalam menangani masalah imigran gelap. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber data yang beragam, baik yang bersifat primer maupun sekunder

Penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengandalkan pengamatan (observasi) dan wawancara (interview). Selanjutnya, upaya memperoleh data secara detil dilakukan melalui wawancara secara mendalam (*in-depth interview*).

### B. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengamatan dan wawancara secara mendalam untuk pengumpulan data dilakukan di tempat-tempat penampungan imigran gelap di Propinsi Jakarta dan Jawa Barat. Sebelum melakukan penelitian lapangan, kegiatan pengumpulan data dan wawancara secara mendalam juga dilakukan di wilayah Jakarta Pusat dan sekitarnya dengan beberapa narasumber, yakni para ahli masalah imigran gelap, dari dalam dan luar negeri.

Narasumber dari dalam negeri adalah para pekerja Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal yang kegiatannya berfokus pada masalah imigran gelap. Sedangkan narasumber dari luar negeri adalah para pekerja LSM asing terkait, seperti IOM dan UNHCR, dan staf Kedutaan Besar negara sahabat, seperti

---

<sup>15</sup> "Dewan Setujui Protokol Menentang Penyelundupan," *Kompas*, 18 Februari 2009, *loc.cit*.

Australia yang meng-*handle* langsung dampak kegiatan imigran gelap. Kegiatan pengumpulan data tingkat awal dilakukan dengan studi kepustakaan.

### **C. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian lapangan dilakukan pada Juli-Oktober 2009. Dalam bulan-bulan itu tersedia waktu yang cukup banyak bagi peneliti untuk mengamati kegiatan para imigran gelap di lokasi penampungannya masing-masing. Juga tersedia kesempatan yang luas bagi peneliti untuk melakukan kegiatan wawancara secara mendalam terhadap berbagai pihak yang terlibat di dalamnya.

Penelitian lapangan dilakukan di Propinsi Jakarta dan Jawa Barat. Propinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat merupakan pusat transit para imigran gelap sebelum mereka melanjutkan perjalanan secara langsung menuju negara tujuan ataupun melalui propinsi lain Indonesia. Di kedua propinsi tersebut terdapat tempat pemrosesan para imigran gelap sebelum mereka diproses akhir untuk dideportasi ke negara asal atau dikirim ke negara tujuan dengan status pengungsi bagi yang memenuhi persyaratan.

## **III. Hasil Penelitian**

### **A. Karakteristik Aktor**

Orang yang hendak bermigrasi secara ilegal terdiri dari mereka yang tidak memiliki modal sama sekali, dan mereka yang masih memiliki modal atau uang. Kelompok terakhir ini terpaksa harus melakukan migrasi secara ilegal karena tidak dapat atau gagal memenuhi persyaratan untuk melakukannya secara legal atau tidak dapat mengurus dokumen perjalanan yang sah yang diperlukan sebagaimana lazimnya, selain juga karena alasan politis yang dihadapi di negara asalnya dan ketidakbersediaan negara tujuan menerima aplikasi mereka untuk dapat diterima menjadi imigran resmi.

Mereka yang bertujuan melakukan migrasi secara legal ini pada umumnya laki-laki dewasa, walaupun ada pula kaum perempuan yang merupakan isteri mereka, dan anak-anak, yang merupakan bagian dari keluarga mereka.<sup>16</sup> Kelompok perempuan, anak-anak, dan orang tua dewasa jarang sekali ditemui, terutama untuk perjalanan migrasi secara gelap ke negara tujuan yang jauh

---

<sup>16</sup> Lihat, "Polri Tangkap 40 Warga Irak Tanpa Dokumen," *Kompas-Online*, 11 April 2009 dan "47 Warga Asing Ditangkap," *Kompas-Online*, 26 April 2009.

sekali, yang harus melakukan beberapa kali transit di negara lain. Keterbatasan atau kelemahan fisik menjadi hambatan utama mereka untuk bisa sampai dengan selamat di negara transit dan tujuan, mengingat mereka harus melakukan perjalanan darat yang panjang dan perjalanan laut yang berbahaya, yang seringkali berujung maut dan gagal sampai ke negara tujuan.

Para calo, perantara, pengirim imigran gelap, atau perencana perjalanan adalah mereka yang bekerja dengan jaringan dan telah berpengalaman mengetahui seluk-beluk rute perjalanan dan kelemahan penjagaannya, baik di negara transit maupun tujuan. Mereka juga mengetahui hukum nasional yang berlaku dan segala sanksinya, berikut kelemahan-kelemahannya (*loopholes*) yang bisa dimanfaatkan untuk disalahgunakan. Sementara, para sopir pengangkut para imigran gelap itu di darat dan awak dan pemilik kapal ataupun para nelayan tradisional merupakan operator lapangan yang bekerja lintas pulau, lautan, dan negara, dengan resiko lebih berbahaya yang mereka hadapi di lapangan.<sup>17</sup> Juga, masih ada pelaku lain yang tidak kecil perannya, yakni, penyedia tempat penampungan dan jasa pengangkutan para imigran gelap.<sup>18</sup> Adapun aparat negara di tempat asal, transit, dan tujuan yang meloloskan mereka adalah pihak yang memberikan perlakuan istimewa dan bisa diajak 'bekerja sama' atau kolusi akibat mental mereka yang korup dan lemahnya kontrol dan penegakan hukum di setiap negara tersebut.<sup>19</sup> Mencari uang adalah motivasi utama mereka terlibat dalam berbagai kegiatan imigran ilegal, yang berbeda dengan tujuan para imigran gelap untuk mencari negara baru yang dapat memberikan mereka rasa aman dan masa depan.

## B. Negara Asal Aktor

Data yang dieproleh selama ini memperlihatkan orang-orang dari negara Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, Pakistan, Irak, Iran, serta Cina (RRC), merupakan langganan pelaku kegiatan imigran gelap, sementara, orang-orang di Indonesia lebih banyak terlibat sebagai perantara atau pihak yang mengirimkan ke negara ketiga untuk tujuan memperoleh uang.<sup>20</sup> Memang ada

<sup>17</sup> Lihat, "Tergilir Rp 90-an Juta, Kapal Kecil Nekat ke Australia," *Kompas-Online*, 3 Nopember 2008.

<sup>18</sup> Lihat, "47 Warga Asing Ditangkap," *Kompas-Online*, 26 April 2009.

<sup>19</sup> Lihat, sebagai pembanding, "18 Imigran Gelap Kabur dari Rutan" *Kompas-Online*, 14 Januari 2009 dan lihat pula informasi pembaca dalam, "Polri Tangkap 40 Warga Irak Tanpa Dokumen," *Kompas-Online*, 11 April 2009.

<sup>20</sup> "Tergilir Rp 90-an Juta, Kapal Kecil Nekat ke Australia," *Kompas-Online*, 3 Nopember 2008.

juga ditemukan orang-orang asal Indonesia sebagai imigran yang masuk secara ilegal ke Malaysia, AS, dan Australia. Namun, lebih banyak imigran gelap berasal dari negara-negara di atas, yang menggunakan wilayah Indonesia sebagai daerah transit sebelum menuju negara tujuan akhir.<sup>21</sup>

Pada kejadian pada 2 Nopember 2008, misalnya, terdapat 12 warga negara Afghanistan dan 8 warga negara Pakistan tertangkap di pelabuhan kecil kawasan Bojonegara, Serang, Banten. Sebanyak 20 orang warga negara asing ini tertangkap aparat keamanan saat akan menyeberang secara ilegal ke Australia lewat Pulau Christmas. Selain menangkap 20 WNA yang hendak menyeberang ke Australia secara ilegal itu, polisi juga telah menangkap 2 orang pemilik kapal dan 8 anak buah kapal (ABK).<sup>22</sup> Juga, dari sebanyak 18 imigran gelap yang telah ditangkap aparat keamanan dan ditahan di Rumah Tahanan (Detensi) Kupang, Nusa Tenggara Timur, karena tidak memiliki dokumen keimigrasian, termasuk paspor saat hendak menyeberang secara ilegal ke Australia, dengan alasan mencari kerja, melalui Rote Ndao dan Bandar Udara El Tari, 13 dari 18 imigran gelap itu berasal dari Afghanistan, sedangkan 5 lainnya dari Myanmar.<sup>23</sup>

Kasus imigran ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia cukup banyak, secara kuantitas, dan sering terjadi belakangan, yang sejak tahun 2008 memiliki kecenderungan peningkatan. Seperti diungkapkan oleh Dirjen Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Basyir Ahmad Barmawi, di Jakarta, baru-baru ini juga tertangkap 19 imigran gelap.<sup>24</sup> Dalam kasus penangkapan di Pelabuhan Bakauheni Lampung pada 24 April 2009, dari 47 imigran gelap yang tertangkap, diketahui mereka semua berasal dari Afghanistan, Pakistan, dan Sri Lanka. Berdasarkan data KP3 Bakauheni, diperoleh informasi, mereka terdiri atas 30 laki-laki dewasa, 10 perempuan dewasa, dan 7 anak-anak.<sup>25</sup>

Sementara itu, kalangan perantara kegiatan atau pengirim imigran gelap yang berasal dari Indonesia ada yang tertangkap aparat keamanan laut Australia di perairan Pulau Ashmore, pada 1 April 2008, setelah kedatangan membawa 59 orang imigran ilegal. Pelaku berkewarganegaraan Indonesia tersebut juga merupakan kru kapal penyelundup manusia ke pesisir utara Australia yang terjadi

---

<sup>21</sup> Lihat, "Tergilir Rp 90-an Juta, Kapal Kecil Nekat ke Australia," *Kompas-Online*, 3 Nopember 2008.

<sup>22</sup> "Tergilir Rp 90-an Juta, Kapal Kecil Nekat ke Australia," *Kompas-Online*, 3 Nopember 2008.

<sup>23</sup> Penjelasan Kepala Bina Operasional Satuan Resor Kriminal Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kupang Iptu Dedy Iskandar, di Kupang, lihat, "18 Imigran Gelap Kabur dari Rutan," *Kompas-Online*, 15 Januari 2009.

<sup>24</sup> "Indonesia Rawan Imigran Gelap," *Kompas-Online*, 9 April 2009.

<sup>25</sup> "47 Warga Asing Ditangkap," *Kompas-Online*, 26 April 2009.

secara terpisah pada awal bulan April 2009. Dalam kasus lain, kapal yang ia kendalikan membawa 38 penumpang dan berhasil berlabuh di Pulau Christmas pada 8 April 2009.

Secara mengejutkan, sebuah kapal yang pada pertengahan April 2009 yang membawa 49 orang pencari suaka dari perairan Indonesia menuju Australia telah meledak dan mengakibatkan 5 orang tewas dan belasan lainnya terluka serius dan menjalani pengobatan di rumah sakit terdekat.<sup>26</sup> Dua orang Warga Negara Indonesia (WNI) termasuk di antara 31 orang yang menderita luka bakar serius akibat "ledakan" di atas kapal kayu pengangkut pencari suaka di perairan Australia pada 16 April 2009 itu. Berdasarkan informasi yang diperoleh Konsulat RI Darwin, kedua WNI itu masing-masing asal Bone (Sulawesi Selatan) dan Muncar, Banyuwangi (Jawa Timur). Adapun 2 orang WNI itu diinformasikan berperan sebagai awak kapal yang mengangkut 47 imigran ilegal asal berbagai negara.<sup>27</sup>

Dalam banyak kasus kedatangan perahu-perahu penyelundup manusia ke Australia sejak 29 September 2008 sampai 24 April 2009, sudah 23 warga Indonesia yang ditahan di Penjara Hakea Perth, Australia Barat.<sup>28</sup> Dua orang awak kapal Indonesia, yaitu, Muasi dan Hasanusi, telah dikenai tuduhan oleh Polisi Federal Australia (AFP) menyelundupkan 38 dan 59 orang lagi pencari suaka ilegal dengan perahu-perahu mereka ke Australia awal April 2009. Sedangkan pada 22 April lalu, sebanyak 14 orang warga Indonesia telah menjalani proses persidangan kasus yang sama di Pengadilan Magistrat Perth. Kasus-kasus penyelundupan ratusan orang pencari suaka asing ke Australia, dalam kenyataannya, telah melibatkan belasan nakhoda perahu asal Indonesia. Tercatat, selama tahun 2008, ada 7 perahu asal Indonesia yang menyelundupkan imigran gelap ke Australia.

Namun, kasus-kasus yang melibatkan pelaku orang Indonesia sebagai perantara dan pengirim imigran gelap, tidak hanya pernah tertangkap di wilayah negara tujuan, namun juga ketika masih berada atau transit di wilayah Indonesia. Sebagai contoh, dalam kasus yang terjadi pada 11 April 2009. Asal kewarganegaraannya pun berbeda dari kebanyakan yang terungkap sebelumnya,

---

<sup>26</sup> "Dua WNI Dijerat Penyelundupan Manusia di Australia," *Republika-Online*, 23 April 2009.

<sup>27</sup> "Meledak, Kapal Kayu Milik WNI, Yang Mengangkut Pencari Suaka," *Republika-Online*, 17 April 2009.

<sup>28</sup> Penjelasan Konsul Fungsi Pensosbud Konsulat RI di Perth, Ricky Suhendar, lihat, "Australia Rawat Intensif WNI Korban 'Ledakan'", ANTARA, 27 April, 2009.

bukan lagi dari Asia Selatan, namun Timur Tengah. Badan Reserse Kriminal Polri telah menangkap 40 warga negara Irak yang tidak memiliki dokumen keimigrasian, diduga akan masuk secara ilegal ke Australia, melalui Pulau Christmas, di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Mereka yang ditangkap itu terdiri dari 17 laki-laki dewasa, 11 wanita dewasa, 8 anak perempuan dan 4 anak laki-laki.<sup>29</sup> Semuanya diketahui berkewarganegaraan Irak.<sup>30</sup> Di luar Irak, imigran gelap juga ada yang berasal dari Iran, yang ditengarai sering menggunakan jalur masuk ke Australia melalui Bali, menggunakan jaringan orang Iran yang sudah ada di sana, dan oknum aparat terkait asal Indonesia.<sup>31</sup>

### **C. Negara Transit dan Tujuan**

#### **1. Negara Transit Indonesia**

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang letaknya strategis di antara 2 benua dan lautan, dengan batas geografi dan jalur pantai yang panjang dan sulit dikontrol oleh aparat dengan peralatan yang terbatas,<sup>32</sup> menjadi jalur transit yang sering digunakan para imigran gelap untuk masuk ke Australia, yang mapan dan maju sistem politik dan ekonominya. Posisi pulau-pulau yang tersebar dan terentang luas dari satu sudut ke sudut lainnya, dan jumlah aparat keamanan laut dan fasilitas mereka yang amat terbatas untuk melakukan kontrol setiap saat, telah membuat wilayah Indonesia sebagai wilayah yang ideal untuk dilalui sebagai wilayah tempat persinggahan sementara, sebelum para imigran gelap dapat melanjutkan perjalanannya menuju negara tujuan akhir, Australia.

Tidak tegasnya penegakan hukum, atau mudah diajak 'kerja sama'-nya aparat, termasuk di tingkat yang terendah, seperti lingkungan RT, menyebabkan mereka mudah memperoleh akses masuk untuk menetap sementara. Yang lebih buruk lagi, perilaku aparat keamanan yang bekerja di garis depan terkait dengan pencegahan dan penanganan imigran ilegal ini, mudah disuap dan mau melepas begitu saja mereka untuk masuk dan keluar

---

<sup>29</sup> Penjelasan, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Abubakar Nataprawira, di Jakarta, dalam "Tergilir Rp 90-an Juta, Kapal Kecil Nekat ke Australia," *Kompas-Online*, 3 Nopember 2008.

<sup>30</sup> "Polri Tangkap 40 Warga Irak Tanpa Dokumen," *Kompas-Online*, 11 April 2009.

<sup>31</sup> Lihat informasi pembaca, *ibid*.

<sup>32</sup> Lihat, "Indonesia Rawan Imigran Gelap," *Kompas-Online*, 9 April 2009.

melanjutkan perjalanan.<sup>33</sup> Tersedianya banyak perantara atau calo yang bersedia mencari pengirim dan juga mereka yang bersedia menjadi pengangkut dengan kapal, telah mendorong lebih banyak lagi mengalirnya imigran gelap dari berbagai negara masuk ke Indonesia untuk beberapa waktu lamanya, sebelum mereka dapat melanjutkan kembali perjalanan.<sup>34</sup> Kemudian, terbukanya pilihan untuk bisa melanjutkan perjalanan dengan transportasi darat, laut, dan udara menuju negara tujuan akhir, Australia, memberi nilai tambah Indonesia sebagai negara transit.<sup>35</sup>

Daerah-daerah terpencil di Indonesia menjadi sasaran pertama para imigran gelap untuk sampai ke wilayah kepulauan ini secara ilegal. Pelabuhan laut menjadi tempat yang mayoritas harus mereka lalui dalam perjalanan transisinya menuju negara tujuan akhir. Dalam kasus 24 April, 47 imigran gelap asal Afghanistan, Pakistan, dan Srilanka tertangkap aparat Kesatuan Polisi Pengaman Pelabuhan (*Sea Port Interdiction*) di Bakauheni, Bandar Lampung.<sup>36</sup> Mereka dilaporkan menggunakan bus dari Jambi menuju Jakarta dengan melintasi Pelabuhan Merak, setelah melalui Pelabuhan Bakauheni.

Sumatera yang dekat dengan Malaysia, menjadi target utama transit para imigran gelap, karena mudah dicapai. Sebelum bisa sampai ke negeri tujuan akhir yang menjadi incaran para imigran gelap selama ini,<sup>37</sup> yakni Australia, tentu saja mereka harus melalui wilayah Indonesia. Pulau-pulau yang tersebar di Indonesia, terutama di bagian yang menjorok keluar, menyediakan pilihan yang banyak bagi pendaratan para imigran gelap. Jajaran kepulauan Riau merupakan salah satunya. Tidak heran wilayah kepulauan Riau adalah batu pijakan pertama para imigran gelap sebelum mereka masuk ke bagian lain Indonesia

Untuk tujuan yang sama, sebanyak 18 imigran gelap asal Afghanistan dan Myanmar juga telah ditangkap saat hendak menyeberang secara ilegal ke Australia, dengan tujuan mencari kerja, melalui Rote Ndao (Nusa Tenggara Timur) atau Bandar Udara El Tari (Kupang).<sup>38</sup> Di Kecamatan Rote Timur, Nusa Tenggara Timur, wilayah di sebelah selatan Desa Oelaba, sering dijadikan tempat

<sup>33</sup> Lihat lagi, sebagai pembandingan, "18 Imigran Gelap Kabur dari Rutan" *Kompas-Online*, 14 Januari 2009 dan lihat pula informasi pembaca dalam, "Polri Tangkap 40 Warga Irak Tanpa Dokumen," *Kompas-Online*, 11 April 2009.

<sup>34</sup> Lihat kembali, "Tergilir Rp 90-an Juta, Kapal Kecil Nekat ke Australia," *Kompas-Online*, 3 Nopember 2008.

<sup>35</sup> Lihat kembali, "18 Imigran Gelap Kabur dari Rutan" *Kompas-Online*, 14 Januari 2009.

<sup>36</sup> "47 Warga Asing Ditangkap," *Kompas-Online*, 26 April 2009.

<sup>37</sup> Lihat kembali, "47 Warga Asing Ditangkap," *Kompas-Online*, 26 April 2009.

<sup>38</sup> "18 Imigran Gelap Kabur dari Rutan" *Kompas-Online*, 14 Januari 2009.

pemberangkatan imigran gelap pada malam hari.<sup>39</sup> Tidak hanya pulau-pulau terpencil dan yang berada di wilayah terluar Indonesia, Jakarta pun, yang terletak di jantung Indonesia turut menjadi sasaran untuk transit para imigran gelap. Ini cukup beralasan, karena di ibukota Indonesia ini terletak kantor UNHCR, sehingga para imigran gelap bisa meminta dan mengurus kartu pengungsi untuk bias disalurkan dan diterima secara legal di negara tujuan. Dalam kasus yang terjadi pada awal April 2009, sebanyak 19 imigran gelap ditangkap karena tidak memiliki dokumen perjalanan.<sup>40</sup>

## **2. Negara Tujuan Australia**

Australia adalah benua, yang sekaligus negara makmur, tetangga Asia, yang letaknya tidak berjauhan. Komposisi penduduk negara tersebut sejak beberapa tahun belakangan diketahui lebih didominasi kelompok lanjut usia (manula atau lansia). Tingkat pertumbuhan penduduknya pun rendah sekali, sehingga secara logis, Australia jumlah penduduknya masih sedikit, sangat kontras dengan daratannya yang begitu luas yang merupakan sebuah benua tersendiri. Karena kondisi yang demikian, orang luar memperkirakan negeri itu butuh penduduk banyak, yang bisa dipenuhi dari kalangan pendatang, jika tingkat pertumbuhan penduduk dalam negeri tetap rendah.

Tetapi, banyak yang tidak menyadari bahwa tentu saja negara besar dan maju di kawasan Pasifik seperti Australia, seperti halnya negara besar dan maju lainnya, sekalipun membutuhkan penduduk pendatang atau imigran, yang dibutuhkan adalah mereka yang memiliki kualitas atau kemampuan tertentu. Dengan kata lain, proses rekrutmen akan dilakukan secara selektif, dengan menilai latar belakang, kapasitas pendidikan, dan keahlian yang mereka miliki. Jadi, pada prinsipnya, pemerintah Australia tidak akan menerima begitu saja para imigran asing tanpa melihat kapasitas atau kapabilitas mereka, apakah sesuai atau dapat memenuhi kebutuhan yang selama ini masih tidak dapat dipenuhi penduduk negerinya sendiri. Dan, inipun harus disadari, sifatnya terbatas, tidak permanen, mengingat bisa saja suatu saat di masa depan, tingkat pertumbuhan penduduk domestik berubah meningkat jika terjadi perubahan nilai dan persepsi di kalangan penduduk domestik.

---

<sup>39</sup> "Meledak, Kapal Kayu Milik WNI, Yang Mengangkut Pencari Suaka," *Republika-Online*, 17 April 2009.

<sup>40</sup> "Indonesia Rawan Imigran Gelap," *Kompas-Online*, 9 April 2009.

Para imigran gelap hanya berpikir sederhana bahwa benua Australia lebih mudah dicapai, dan besar harapan atau peluang keberhasilan yang disediakan disana dibandingkan dengan Eropa dan Amerika. Akses ke Eropa dan AS lebih jauh dan lebih sulit, baik melalui darat maupun laut. Belum lagi ketentuan hukum yang akan menghalangi mereka di berbagai negara yang akan dilalui, begitu ketat atau konsisten, karena di Eropa telah ada kesepakatan regional melalui Uni Eropa yang menutup pintu terhadap pengungsi yang bermotivasi ekonomi, apalagi imigran gelap. Terdapat paling sedikit 160 ribu imigran gelap yang telah mencoba masuk ke Australia, dengan sekitar 13 ribu yang memiliki alasan kemanusiaan.<sup>41</sup>

#### **D. Motivasi Aktor**

Buruknya kehidupan dan suramnya masa depan di negara asal adalah alasan umum dan pemicu terbesar kasus-kasus mengalirnya imigran gelap ke negara lain. Perubahan nasib dan keadaan, serta kehidupan yang lebih baik di negeri baru, merupakan harapan para imigran gelap untuk lari dari negeri mereka. Dengan keluar dari negara asal mereka, paling tidak mereka memiliki harapan baru, dengan peluang hidup dan masa depan yang berbeda jika telah berada di negara transit, apalagi tujuan. Jika di kalangan imigran gelap yang akan ke Amerika ada yang disebut sebagai *American dream*, maka di kalangan imigran gelap yang menuju ke Australia, terdapat pula impian seperti itu, yang bisa dikatakan sebagai *Australian dream*.

Dilihat secara detil, motivasi para imigran gelap bisa saja sedikit berbeda. Tetapi, pada umumnya, motivasi yang menyebabkan mereka melakukan imigrasi secara ilegal adalah adanya permasalahan krusial yang mereka hadapi di negara asal masing-masing, yang dapat dilihat dari perspektif politik, keamanan, ekonomi, maupun pandangan individual. Tanpa permasalahan-permasalahan dasar ini, tidak mungkin mereka mau melakukan kegiatan yang sangat berisiko, yang membutuhkan biaya material dan manusiawi yang tinggi, yang pada akhirnya nyawa mereka sendiri menjadi taruhan di perjalanan, terutama di laut lepas, baik akibat tantangan alam, maupun kebijakan keras aparat keamanan di negara transit dan tujuan. Jadi, bagaimanapun, ada penyebab jelas mengalirnya imigran gelap dari suatu negara ke negara lainnya.

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Michael Bliss, *Minister Counsellor* untuk Politik dan Ekonomi Kedutaan Besar Australia di Indonesia, pada 26 Agustus 2009 di Jakarta.

## 1. Politik

Apakah persoalan mendasar dalam negeri yang menyebabkan banyak penduduk Pakistan, Bangladesh, dan Myanmar ingin keluar dari negerinya, melarikan diri ke negeri lain, termasuk dengan cara ilegal menjadi imigran gelap? Sikap pemerintah yang berkuasa yang tidak dapat diterima, yang tidak mempunyai empati, dan konflik politik domestik yang berkepanjangan telah mengakibatkan munculnya ketidakstabilan politik yang akut di ketiga negeri itu.

Di Pakistan dan Bangladesh, dua negara yang bertetangga, dan juga bersaudara, karena dulunya memang satu negara, pilihan atas demokrasi telah membawa kisruh politik dalam negeri yang tidak kunjung selesai, dan bukan segera menjadi *panacea* untuk memperbaiki kisruh politik sebelumnya akibat penjajahan Barat, konflik agama, dan otoriterisme pemerintahan militer. Sebaliknya, di Myanmar, demokrasi yang menjadi harapan kelompok-kelompok anti-rejim otoriter militer yang telah berkuasa selama beberapa tahun belakangan, tidak kunjung datang, dan telah menyebabkan banyak penduduk yang tertindas, terutama kelompok minoritas, seperti etnis Muslim Rohingya, yang berseberangan dengan kelompok etnis militer yang tengah berkuasa, terpaksa melarikan diri dan masuk secara ilegal ke negeri lain, termasuk ke Thailand, Malaysia, dan Indonesia, untuk bisa diterima tinggal di negeri-negeri baru ini.

Konflik demokrasi secara realistis telah menyebabkan eskalasi kekerasan dalam jangka panjang, terutama setelah terimbas munculnya kelompok-kelompok ekstrim keagamaan. Perkembangan politik yang buruk di Afghanistan setelah jatuhnya rejim konservatif Taliban, dan perang melawan terorisme yang dilancarkan Barat yang belum selesai di sana, berdampak buruk pada kondisi dalam negeri Pakistan pasca-Musharraf. Tidak heran, penduduk kedua negeri Muslim di jazirah Asia Selatan itu mencari negeri-negeri yang lebih moderat dan lebih baik kondisinya, yang kehidupan sehari-hari penduduk dan masa depannya tidak terganggu.

Di kawasan Timur-Tengah pun demikian, terjadi pengaliran penduduk keluar baik secara legal maupun ilegal keluar Irak dan Iran. Dari Irak, yang mengalir jauh lebih banyak, karena ia telah menjadi sebuah negara gagal (*failed state*), setelah jatuhnya Saddam Hussein, yang diindikasikan dengan maraknya konflik sektarian antar-pengikut aliran agama, serta juga aksi-aksi terorisme sebagai perlawanan terhadap rejim baru ciptaan-Barat di satu pihak, dan perang

melawan terorisme yang terus dilancarkan Barat, di pihak lain, terutama AS.<sup>42</sup> Tidak berhentinya hingga dewasa ini serangan bom bunuh diri yang selalu menyebabkan juga jatuhnya korban sipil membuat Irak sebagai kawasan tidak aman, yang tidak hanya membuat penduduk setenpat ingin keluar dari Irak, melainkan juga militer asing yang ditugaskan di sana.

Eskalasi kekerasan di Irak meningkat pesat setelah jatuhnya pemerintahan konservatif Taliban di Afghanistan akibat invasi militer AS ke Timur-Tengah. Walaupun rejim sipil pengganti yang tidak otoriter telah berhasil dibentuk dengan bantuan Barat, namun tertib sipil dan keamanan domestik tetap belum berhasil diwujudkan. Para aktor non-negara di Afghanistan di bawah kendali Taliban yang terpojok meningkatkan perjuangannya melawan ofensi militer Barat dengan memanfaatkan wilayah-wilayah di Pakistan yang banyak didiami kelompok-kelompok konservatif pro-Taliban. Akibatnya, Pakistan, setelah Afghanistan dan Irak, kini menjadi wilayah paling berbahaya baru di dunia. Tidak mengejutkan, penduduk ketiga negeri itu banyak yang lari menyelamatkan diri ke luar negara mereka dengan berbagai macam cara.<sup>43</sup> Mereka yang memiliki modal atau uang, jelas mempunyai kesempatan lebih luas untuk menjadi imigran, sekalipun secara ilegal, jika ditentang kepergian mereka dari negeri asal mereka dan kedatangan mereka di negeri baru.

Iran, tetangga Irak, kondisi politik dan keamanan domestiknya memang berbeda, karena terkontrol dengan baik oleh pemerintahan Ahmadinejad. Tetapi, tidak semua menyukai rejim konservatif Ahmadinejad yang telah berkuasa selama 2 periode ini. Sehingga, mereka yang melakukan kegiatan imigrasi secara ilegal menggunakan alasan ini untuk keluar dari Iran dan mencari negeri baru. Mereka yang tertangkap di Indonesia, dan mereka yang akan melanjutkan perjalanan ilegalnya ke Australia, dapat diidentifikasi sebagai mereka yang tidak dapat menerima situasi politik dalam negeri Iran pasca pemerintahan moderat Khatami. Sikap Presiden Ahmadinejad yang keras terus menentang Barat dengan propaganda pengembangan kekuatan nuklirnya, yang berimplikasi luas meningkatkan ketegangan di Iran dan kawasan, menciptakan keadaan tidak nyaman penduduknya, terutama mereka yang berpikir moderat dan pragmatis, apalagi pro-Barat.

---

<sup>42</sup> Lihat, misalnya, "Polri Tangkap 40 Warga Irak Tanpa Dokumen," *Kompas-Online*, 11 April 2009.

<sup>43</sup> Lihat, misalnya, "47 Warga Asing Ditangkap," *Kompas-Online*, 26 April 2009 dan "Terguir Rp 90-an Juta, Kapal Kecil Nekat ke Australia," *Kompas-Online*, 3 Nopember 2008.

## 2. Keamanan

Myanmar, yang belakangan ini merupakan sumber asal pengungsi dalam jumlah besar dan beberapa gelombang kedatangan, sejak lama berada di bawah cengkeraman kekuasaan rejim militer yang otoriter dan represif, khususnya terhadap kelompok pro-demokrasi dan minoritas etnik. Demokrasi yang menjadi kunci ke arah kehidupan politik yang demokratis, tanpa diskriminasi, tidak kunjung tiba, melainkan hanya merupakan janji-janji palsu rejim militer. Sejak ditangkapnya tokoh utama gerakan pro-demokrasi, Aung San Syu kyi, oleh rejim militer yang telah membatalkan kemenangan pemilu kelompok tersebut, perilaku rejim militer semakin otoriter dan represif terhadap penduduknya, tidak terkecuali kelompok etnik minoritas yang memang berbeda latar belakang etnik dengan rejim militer yang berkuasa. Karena tidak tahan bertahun-tahun dipertakutkan secara represif oleh pemerintah yang berkuasa, mereka kemudian melarikan diri melalui laut dengan perahu-perahu tradisional mereka keluar negeri itu, dan tiba atau pun terdampar antara lain di Thailand, Malaysia, dan Indonesia.

Begitu pula, di Srilanka, sejak lama konflik berkecamuk antara kelompok etnik Sinhala yang mayoritas dengan kelompok etnis Tamil yang minoritas. Gencatan senjata yang telah berhasil dicapai setelah konflik hebat dan banyak menelan korban jiwa selama bertahun-tahun, dalam kenyataannya, tidak berlangsung lama, karena kemudian perang berkecamuk kembali. Tidak adanya solusi permanen atas masalah yang dihadapi kedua belah pihak, menyebabkan perang dan aksi-aksi kekerasan berlangsung lagi. Kelompok minoritas Tamil pun kembali mengangkat senjata dan memperjuangkan aspirasi separatisme mereka membentuk negara sendiri. Namun, di luar kelompok perjuangan bersenjata *Tamil Eelam* (Macam Tamil), penduduk sipil banyak menjadi korban, sehingga untuk menghindari gelombang kekerasan akibat perang fase baru itu, mereka melarikan diri ke negara lain dengan menggunakan perahu-perahu. Jumlah mereka yang keluar dari negerinya dengan perahu-perahu semakin banyak belakangan ini setelah pemerintah Srilanka melakukan ofensif militer besar-besaran ke sarang gerilyawan Macam Tamil. Keadaan terpaksa menghindari ofensif militer pemerintah Sinhala menyebabkan banyak penduduk Tamil menjadi imigran ilegal karena mereka berusaha masuk ke berbagai negara tanpa dilengkapi dokumen perjalanan yang sah.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Lihat, "47 Warga Asing Ditangkap," *Kompas-Online*, 26 April 2009.

Kekawatiran terhadap perang yang berkecamuk dan tidak berkesudahan juga dihadapi penduduk sipil di Afghanistan dan Irak. Eskalasi konflik yang meningkat dan mengancam nyawa dan kehidupan keluarga, dan kegagalan badan dunia PBB dan dunia internasional untuk mencegah dan mengatasinya, menyebabkan banyak penduduk sipil mencari wilayah aman baru di berbagai negara. Rasa aman juga dicari penduduk sipil Iran yang berseberangan secara ideologis dengan pemerintah konservatif yang tengah berkuasa di sana.

### **3. Ekonomi**

Myanmar, Bangladesh, Srilanka, Afghanistan, Pakistan, dan Irak, negeri-negeri asal imigran gelap tersebut, menghadapi kemiskinan dan keterpurukan ekonomi yang hebat, akibat pemerintahan yang otoriter, sistem politik yang korup ataupun konflik politik dan perang saudara yang berkepanjangan. Ketidakstabilan politik dalam negeri yang lama telah membawa dampak sangat buruk pada perekonomian masing-masing negara. Stagnasi ekonomi, tidak adanya peluang usaha, tidak tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya pengangguran, serta merosot dan buruknya kesejahteraan dan kualitas kehidupan penduduk mendorong mereka mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain.

Buat para perantara atau calo dan mereka yang terlibat menyalurkan imigran gelap di negara asal, transit, maupun tujuan, uang adalah tujuan kegiatan mereka. Di Indonesia, mereka yang melakukan ini pada umumnya dimotivasi oleh kepentingan ekonomi yang mendesak. Tidak heran, mereka orang-orang kecil yang terlibat, seperti sopir dan nelayan-nelayan tradisional mau melakukannya atas suruhan orang lain (perantara atau calo) walaupun harus menghadapi resiko ancaman hukuman berat di negara tujuan dan terancamnya jiwa mereka akibat beratnya perjalanan dan ganasnya gelombang lautan.<sup>45</sup>

Sekalipun ada akibat (korban) perkembangan situasi politik dalam negeri, namun, selalu saja terdapat kepentingan ekonomi para imigran gelap. Keinginan untuk memperoleh kesejahteraan hidup dan menggapai masa depan yang lebih baik memberikan motivasi yang lebih besar daripada tinggal selamanya tanpa harapan, hidup dalam kesusa-han atau keterbelakangan di negara asal. Jelasnya, tujuan para imigran gelap pada akhirnya adalah memiliki harapan dan masa

---

<sup>45</sup> Lihat, misalnya, "47 Warga Asing Ditangkap," *Kompas-Online*, 26 April 2009; "Tergilir Rp 90-an Juta, Kapal Kecil Nekat ke Australia," *Kompas-Online*, 3 Nopember 2008, dan "Dua WNI Dijerat Penyelundupan Manusia di Australia," *Republika -Online*, 23 April 2009.

depan baru yang lebih baik di negeri tujuan yang makmur kondisi ekonominya dan juga menyediakan peluang untuk maju secara luas, walaupun di luar itu, ada juga yang lebih dipicu oleh alasan politis. Tetapi, jika semua alasan lengkap ada di sana dan menjadi motivasi mengapa orang melakukan kegiatan imigran secara ilegal, maka dapat dikatakan sudah tercipta situasi yang *complex emergencies*. Contoh untuk kasus ini adalah para imigran gelap asal Afghanistan dan Irak.

## **E. Kebijakan Penanganan**

Terhadap para imigran gelap, selama ini terdapat respons, kebijakan, dan perlakuan yang berbeda-beda, tergantung pada temuan atas motivasi yang sebenarnya mengapa mereka melakukan kegiatan itu. Semua respons pemerintah Indonesia dilakukan secara bertahap, namun dapat dikatakan, tidak ada yang sifatnya tegas dan berupa sanksi atau hukuman yang keras. Pada tahap pertama, imigran gelap ditangkap, lalu ditahan. Kalau tuduhannya pidana, bisa disidangkan dan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Jika tidak ada tuduhan pidana, para imigran gelap langsung dipulangkan atau dilakukan deportasi ke negara asal. Dalam menunggu proses, mereka ditahan sementara, namun bisa juga lama, jika tidak baik komunikasi dengan negara asal dan jelas penyelesaiannya.<sup>46</sup> Jika jelas dan benar status mereka sebagai pengungsi, dan negara ketiga mau menerima, mereka bisa segera dikirim ke negara ketiga. Di luar itu, mulai digarap kerja sama bilateral dan multilateral untuk mengatasi mengalirnya para imigran gelap, di luar solusi unilateral yang keras yang diterapkan Australia di atas.

### **1. Penangkapan dan Penahanan Sementara**

Langkah penangkapan adalah upaya pertama yang dilakukan aparat keamanan Indonesia terhadap para imigran gelap yang tertangkap oleh mereka selama melakukan kontrol di lapangan, terutama di wilayah perairan (laut). Namun, ada juga yang tertangkap dalam perjalanan transit di darat. Laporan yang diterima atau masuk dari masyarakat sangat memegang peran penting dalam proses penangkapan mereka yang sedang sembunyi di wilayah transit, atau sedang menunggu pengangkutan selanjutnya ke wilayah lain dan negara tujuan.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Lihat, misalnya, "18 Imigran Gelap Kabur dari Rutan" *Kompas-Online*, 14 Januari 2009.

<sup>47</sup> Lihat kasus "18 Imigran Gelap Kabur dari Rutan" *Kompas-Online*, 14 Januari 2009.

Selanjutnya, jika mereka ditengarai tidak steril atau membawa wabah penyakit yang bisa mengakibatkan penyebaran penyakit tertentu, mereka ditahan dalam tahanan karantina pihak imigrasi. Jika mereka memang bersih dari wabah penyakit, mereka bisa dimasukkan dalam tahanan sementara pihak imigrasi (detensi), yang terdapat tidak hanya di ibukota dan kota-kota besar Indonesia, tetapi juga daerah-daerah yang dekat dengan pelabuhan udara, laut, atau juga perbatasan darat. Para imigran gelap yang tertangkap di perjalanan bisa dikirim langsung ke tahanan imigrasi pusat di Jakarta, yang memang dikhususkan untuk imigran bermasalah.<sup>48</sup>

Penahanan bersifat sementara, sambil mereka diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Para imigran gelap itu kemudian diselidiki motifnya, apakah memang sesuai dengan keterangan ketika tertangkap di lapangan oleh aparat imigrasi atau kepolisian, dan sesuai pula dengan asal-usul mereka dan situasi yang berkembang di negara asal. Aparat yang berwenang juga menyelidiki apakah ditemukan ada pelanggaran pidana bersama-sama dengan kegiatan imigrasi gelap mereka, seperti penyelundupan narkoba, senjata api, pemalsuan paspor dan visa, pembunuhan, terorisme, dan seterusnya. Jika ditemukan, mereka akan diproses pengadilan dan dijatuhi hukuman, untuk kemudian dikenakan hukuman penjara yang berkuatan hukum tetap, dan tidak bersifat sementara lagi.

## **2. Pemulangan Paksa (Deportasi)**

Dalam hal para imigran gelap berdasarkan penyelidikan aparat yang berwenang tidak ditemukan terlibat atau berbuat pelanggaran pidana di wilayah hukum Indonesia, mereka bisa segera dilepaskan dan dikembalikan segera ke negara asal. Dalam tahapan ini, penyelidikan tentang latar belakang dan situasi di negara asal telah dilakukan dengan cermat, demikian pula negosiasi untuk penyelesaian masalah mereka dengan baik. Seperti hanya proses penahanan sementara, proses pemulangan (deportasi) ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya negara penangkap imigran gelap tersebut dan yang memulangkannya, kecuali ada kesepakatan khusus antara negara asal dan yang akan melakukan deportasi, bisa saja biaya pemulangan dan fasilitasnya ditanggung negara asal, seperti dalam kasus penyelesaian imigran asal Bangladesh.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Lihat, "47 Warga Asing Ditangkap," *Kompas-Online*, 26 April 2009.

<sup>49</sup> Lihat, "UNHCR Verifikasi Muslim Rohingya," *Republika-Online*, 17 April 2009.

Semua masalah teknis pemulangan biasanya diatur sepenuhnya pihak pemerintah negara yang memulangkan. Kebijakan ini bisa dilakukan secara massal, yang dapat dilakukan baik melalui jalur darat, laut, maupun udara, sesuai dengan kondisi di lapangan. Di luar itu, deportasi ada yang dilakukan secara sukarela oleh para imigran yang lama dan tidak sabar tidak memperoleh kepastian *resettlement* dari negara ketiga. Dalam kasus ini bisa saja biaya ditanggung si imigran itu sendiri, mengingat mereka memiliki kemampuan finansial pribadi maupun memperoleh dukungan dari keluarga.<sup>50</sup>

Namun, di Indonesia, dengan disiplin aparat yang rendah, dan hukum tidak diimplementasikan dengan tegas, walaupun telah diketahui para imigran gelap itu tidak memenuhi syarat untuk memperoleh status pengungsi, atau negara ketiga tidak mau menerima mereka sebagai imigran, tindakan tegas tidak segera dilakukan dengan mendeportasi mereka. Sehingga, hal ini menyebabkan terjadinya proses penampungan yang lama, yang mudah terjadi penyelewengan dan berbagai dampak sampingan.<sup>51</sup>

### **3. Penampungan dan Penahanan Lama**

Kebijakan penampungan dan penahanan para imigran gelap dalam tempo lebih panjang dilakukan jika terdapat penyelidikan mendalam atas latar belakang dan motivasi mereka. Hal ini terutama jika ada di antara mereka yang ditengarai terlibat dalam jaringan penyelundup narkoba dan terorisme internasional. Proses penyelidikan yang lambat dan kebijakan yang tidak tegas, apakah mereka perlu diperiksa lebih lanjut oleh aparat yang berwenang dan diserahkan ke pengadilan, ataukah segera dinyatakan statusnya sudah jelas sebagai imigran gelap, membuat mereka ditampung lama di karantina atau tempat penahanan imigrasi di berbagai daerah di Indonesia.

Dengan lemahnya disiplin kerja aparat negara yang berwenang dan penegakan hukum, banyak implikasi negatif yang bisa terjadi. Para imigran gelap dapat mencoba mempengaruhi aparat dengan mencoba menyuap mereka dengan menjanjikan atau memberikan secara langsung uang yang mereka bawa dalam perjalanan, untuk bisa dilepas dan melarikan diri melanjutkan perjalanan ilegal mereka ke negara tujuan akhir. Mereka bisa juga memberikan uang secara

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Lukman, *Operational Officer* di CWS (*Church World Services*), *Implementing Agency* of UNHCR, di Cipayung, Jawa Barat pada 1 Oktober 2009; Wawancara dengan Lukman, *Operational Officer* di CWS (*Church World Services*), *Implementing Agency* of UNHCR, di Jakarta pada 2 Oktober 2009.

<sup>51</sup> Lihat, "18 Imigran Gelap Kabur dari Rutan", *Kompas-Online*, 14 Januari 2009.

tidak langsung melalui perantara (agen) mereka di luar penjara, baik yang berlatarbelakang kewarganegaraan yang sama dengan mereka, yang sudah tinggal di negara transit Indonesia, maupun asal penduduk setempat.

Mereka bisa juga melarikan diri sewaktu-waktu, karena banyak tersedia kesempatan untuk itu, mengingat mereka diperlakukan secara istimewa seperti tamu resmi, dan bukan tahanan kriminal,<sup>52</sup> termasuk dengan memperdaya aparat negara yang tengah bertugas dan menggunakan cara kekerasan terhadap mereka.<sup>53</sup> Sebaliknya, aparat yang berdisiplin kerja rendah akibat lemahnya kontrol dan penegakan hukum secara nasional, bisa berdalih mereka 'ditipu' dan 'dikerjai' untuk menutupi kelemahan mereka. Sikap tanpa keputusan terhadap para imigran gelap yang telah tertangkap dan ada dalam tahanan, yang selain disebabkan oleh lambatnya penyelidikan atas status mereka, juga dipengaruhi oleh lambatnya proses pengadilan dilakukan, walaupun mereka telah ditengarai kuat melakukan pelanggaran pidana di wilayah Indonesia, mengakibatkan mereka lama ditahan di tempat penampung-an. Selanjutnya, hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan setempat yang membuktikan pelanggaran mereka, membuat mereka semakin lama berada di tahanan, tidak lagi di karantina, tempat penahanan sementara pihak imigrasi (detensi), tetapi penjara umum.

#### **4. Penyaluran ke Negara Ketiga**

Alternatif kebijakan terakhir yang dibuat pemerintah Indonesia terhadap para imigran gelap adalah menyalurkan mereka ke negara tujuan akhir. Hal ini baru segera diproses, jika telah ada kesepakatan menerima mereka, tanpa keberatan apapun, setelah melalui proses negosiasi dan penyelidikan yang cermat, dan biasanya memakan waktu cukup lama.

Selain memberikan perlakuan jauh lebih baik terhadap mereka yang sudah maupun belum berstatus pengungsi, karena belum terbukti melalui verifikasi, terutama lewat UNHCR, pemerintah Indonesia memperlihatkan empati yang tinggi untuk mengurus mereka yang minta dikirim ke negara ketiga dengan

---

<sup>52</sup> Secara realistis, mereka boleh hidup membaur dengan penduduk lokal, walaupun statusnya belum jelas sebagai pengungsi. Yang sudah berstatus pengungsi, namun masih menunggu *resettlement*, ada yang sudah menikah dengan penduduk lokal, dan bekerja, misalnya berjualan, namun tetap menerima tunjangan bulanan yang cukup di atas UMR dari UNHCR. Kebanyakan pengungsi bahkan telah menggunakan alat transportasi pribadi sendiri, seperti motor, dan bebas berkeliaran, sebagaimana penduduk lokal, tanpa dibatasi mobilitasnya. Wawancara dengan pengungsi Tamil (Srilanka) dan Somalia, yang dilakukan masing-masing di Cipayung dan Jakarta pada 1 dan 2 Oktober 2009.

<sup>53</sup> Lihat kasus "18 Imigran Gelap Kabur dari Rutan" *Kompas-Online*, 14 Januari 2009.

status pengungsi.<sup>54</sup> Proses pengurusan status dan penyaluran mereka membutuhkan waktu dan sekaligus biaya, yang sudah pasti merepotkan negara transit dan negara ketiga yang mau menampung mereka. Dalam beberapa kasus, terdapat pengungsi yang sudah melakukan aplikasi sebagai pengungsi dan tinggal selama 3 sampai 6 tahun di Indonesia masih belum memperoleh negara tempat pemukiman kembali mereka.<sup>55</sup> Karena itulah, isu pengungsi dan imigran gelap sebenarnya tidak disukai di negara transit dan tujuan akhir.

### **5. Respons Internasional**

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menginstruksikan kepada aparat untuk memberi bantuan kemanusiaan sebaik-baiknya kepada imigran gelap.<sup>56</sup> dan ingin memperhatikan masalah tersebut dengan sungguh-sungguh. Namun, menurut pihak di negara tujuan dan organisasi internasional, hal itu belum cukup, sebab Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional mengenai Pengungsi tahun 1951,<sup>57</sup> sehingga ia tidak dapat dikenakan sanksi internasional jika tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya. Amandemen UU Imigrasi No. 12/2006 tidak cukup untuk memerangi kasus penyelundupan manusia.

Yang keras dalam merespons dan menangani kasus masuknya imigran gelap selama ini adalah Australia. Tidak heran, kapal-kapal motor nelayan ataupun perahu-perahu tradisional yang mengangkut para imigran gelap itu kemudian terbakar, meledak,<sup>58</sup> mengalami penembakan, atau insiden lainnya ketika telah berada di wilayah perairan Australia. Sementara, ketika berada di lautan lepas yang ganas justru tidak menghadapi berbagai macam insiden.

<sup>54</sup> Lihat, antara lain, "UNHCR Verifikasi Muslim Rohingya," *Republika-Online*, 17 April 2009.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Lukman, *Operational Officer* di CWS (*Church World Services*), *Implementing Agency of UNHCR*, di Cipayung dan Jakarta pada 1 dan 2 Oktober 2009; Wawancara dengan pengungsi Afghanistan dan Tamil (Srilanka) di *Educational Center for Refugees* di Cipayung, Jawa Barat pada 1 Oktober 2009; Wawancara dengan pengungsi Myanmar, Somalia, dan Afghanistan di *Councelling Center for Refugees* di Jakarta pada 1 Oktober 2009.

<sup>56</sup> "Indonesia-Australia Kerja Sama Tangani Pendatang Ilegal," *Republika-Online*, 19 April 2009.

<sup>57</sup> Wawancara dengan Steve Hamilton, *Programme Coordinator*, dan Ronnie Bala, *National Operations Officer*, pada *International Organization for Migration* (IOM), pada 26 Agustus 2009 di Jakarta; Wawancara dengan Michael Bliss, *Minister Counsellor* untuk Politik dan Ekonomi Kedutaan Besar Australia di Indonesia, pada 26 Agustus 2009 di Jakarta..

<sup>58</sup> Lihat, antara lain, "Meledak, Kapal Kayu Milik WNI, Yang Mengangkut Pencari Suaka," *Republika-Online*, 17 April 2009. Di sumber ini dijelaskan, dari sebanyak 47 penumpang kapal pencari suaka dan awaknya, 31 menderita luka bakar serius, 3 tewas, dan 2 hilang.

Pemerintah Australia menolak mengatakan bersikap keras, melainkan tegas, dalam merespons masuknya imigran gelap,<sup>59</sup> karena jika ditoleransi dapat membawa implikasi atas keamanan domestik. Pemerintah Australia tampaknya mau menerapkan kebijakan penangkalan (*deterrent*) dan “*pre-emptive*” untuk mencegah para imigran gelap masuk ke wilayahnya sedini mungkin, walaupun bagi pemerintah Australia penggunaan istilah itu dinilai tidak tepat, karena tujuannya juga untuk mencegah dan melindungi Indonesia dari imigran gelap.<sup>60</sup> Bagi pemerintah negeri itu, lebih baik repot menerapkan kebijakan pencegahan di negara asal dan transit sejak awal daripada harus menghadapi dan menyelesaikan, apalagi menerima mereka, di wilayahnya. Pemerintah Australia hanya mau peduli melakukan negosiasi jika para calon imigran gelap masih berada di wilayah negara mereka sendiri dan negara transit. Sementara, jika sudah sampai di wilayah kedaulatan Australia, yang ada hanyalah tindakan keras dan penerapan sanksi hukum negeri itu.

Dalam rangka kebijakan penangkalan dan “*pre-emptive*” ini, diketahui pemerintah Australia bersedia mengeluarkan biaya besar untuk mendidik aparat, seperti kepolisian, angkatan laut, Dephan, Depkumham, dan imigrasi, di Indonesia, dalam menangani kasus-kasus imigran gelap dan mengirim mereka ke Australia untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan singkat.<sup>61</sup> Pendirian pusat-pusat pelatihan untuk itu di Indonesia dengan bantuan pemerintah Australia, termasuk di Akademi Kepolisian di Semarang, terutama dalam pembiayaannya, sejalan dengan kebijakan negeri itu dalam mengatasi ancaman terorisme internasional, mengingat mengalirnya imigran gelap mengandung unsur kejahatan transnasional terorganisasi.

Melalui jalur bilateral dengan Indonesia, kerja sama semakin kuat dan gencar dilakukan belakangan ini.<sup>62</sup> Dalam berbagai pertemuan di tingkat menteri dan kepala pemerintahan, secara formal maupun informal, penanganan imigran gelap telah banyak dibicarakan. Presiden Yudhoyono telah menerima telpon dari PM Kevin Rudd terkait peningkatan pendatang ilegal yang signifikan di tahun 2009, untuk kerja sama mencari solusi terbaik.<sup>63</sup>

<sup>59</sup> Wawancara dengan Michael Bliss, *Minister Counsellor* untuk Politik dan Ekonomi Kedutaan Besar Australia di Indonesia, pada 26 Agustus 2009 di Jakarta.

<sup>60</sup> Wawancara dengan Michael Bliss, *Minister Counsellor* untuk Politik dan Ekonomi Kedutaan Besar Australia di Indonesia, pada 26 Agustus 2009 di Jakarta.

<sup>61</sup> Wawancara dengan Michael Bliss, *Minister Counsellor* untuk Politik dan Ekonomi Kedutaan Besar Australia di Indonesia, pada 26 Agustus 2009 di Jakarta.

<sup>62</sup> Wawancara dengan Steven Yates, *Third Secretary*, untuk bidang Kedutaan Besar Australia di Indonesia, pada 26 Agustus 2009 di Jakarta.

<sup>63</sup> Indonesia-Australia Kerja Sama Tangani Pendatang Ilegal,” *Republika-Online*, 19 April 2009.

Kerja sama juga dilakukan masing-masing negara dengan badan internasional yang mengurus pengungsi dan imigran, seperti UNHCR<sup>64</sup> dan IOM. Pemerintah Australia telah memberikan dukungan signifikan melalui pembangunan 15 *detention centres* di berbagai daerah di Indonesia, dengan yang terbesar di Tanjung Pinang, Riau.<sup>65</sup> IOM dalam kerja samanya sejak 2007 telah memberikan pelatihan pada sebanyak 33 aparat negara dari berbagai instansi.<sup>66</sup>

Kerja sama yang lebih maju tampak dalam kesepakatan UNHCR dan pemerintah Myanmar di Konferensi Bali untuk melakukan pembangunan ekonomi di wilayah Arakan, Myanmar untuk mencegah imigran ilegal. Pemerintah Australia telah menyatakan kesediannya berkontribusi dalam program tersebut sebesar 3.2 juta dolar Australia,<sup>67</sup> sehingga lebih maju lagi dari hanya membangun pusat atau membiayai pelatihan penanggulangan imigran gelap seperti dalam kerja samanya selama ini dengan Indonesia.<sup>68</sup>

## IV. Kesimpulan dan Saran

### I. Kesimpulan

Permasalahan domestik yang dihadapi negara-negara yang dilanda konflik dan menghadapi keterbelakangan ekonomi telah mendorong penduduknya melakukan eksodus secara berkelompok sebagai imigran ilegal ke negara yang stabil secara politik dan mapan secara ekonomi. Indonesia merupakan negara tujuan transit yang ideal karena kebijakan pemerintahnya yang dinilai lembek, tidak konsisten, dan kondusif dengan kebutuhan para imigran gelap. Sedangkan Australia merupakan negara tujuan akhir yang banyak menjadi sasaran mereka.

Alasan yang diberikan para imigran gelap dalam melakukan kegiatannya pada umumnya sama. Mereka berpendapat adanya ancaman keamanan di negeri asal mereka akibat konflik atau perang saudara yang berkepanjangan dan perbedaan pendapat dengan kelompok yang berkuasa. Tetapi, dalam banyak

<sup>64</sup> Lihat, antara lain, "UNHCR Verifikasi Muslim Rohingya," *Republika-Online*, 17 April 2009.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Michael Bliss, *Minister Counsellor* untuk Politik dan Ekonomi Kedutaan Besar Australia di Indonesia, pada 26 Agustus 2009 di Jakarta

<sup>66</sup> Wawancara dengan Steve Hamilton, *Programme Coordinator* dan Ronnie Bala, *National Operations Officer*, pada *International Organization for Migration* (IOM), pada 26 Agustus 2009 di Jakarta.

<sup>67</sup> "UNHCR Verifikasi Muslim Rohingya," *Republika-Online*, 17 April 2009.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Robert Ashe, *Regional Representatives*, UNHCR di Jakarta pada 26 Agustus 2009 di Jakarta.

kasus, mereka yang ditemukan sebagai imigran gelap tidak berlatar belakang sebagai orang yang terancam hidupnya oleh bahaya perang dan kelompok yang berkuasa di negerinya, melainkan lebih tepat sebagai orang yang berusaha mencari kehidupan yang lebih baik di negara maju. *Modus operandi* yang dilakukan para imigran gelap dalam menjalankan kegiatannya pada umumnya sama. Tidak sedikit mereka yang memakai tiga jenis jasa transportasi, baik udara, laut, maupun darat menuju negara transit, sebelum melanjutkan dengan jalur transportasi laut dengan kapal-kapal kecil untuk masuk ke negara tujuan akhir.

Selanjutnya terdapat beberapa jenis kebijakan penanganan yang dilakukan pemerintah negara tempat transit dan tujuan, baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri (unilateral) maupun dengan bekerja sama (bilateral) dan yang menjadi konsekuensi dari kesepakatan multilateral yang telah disetujui dan diratifikasi parlemen nasional. Kebijakan penanganan imigran gelap membutuhkan biaya yang tidak sedikit, apalagi dalam jangka panjang. Walaupun kerja sama bilateral maupun multilateral dapat meringankan beban negara transit dan tujuan, dari perspektif ekonomi, politik dan keamanan, namun pemerintah Indonesia belum memperlihatkan keinginan mendukung parlemen untuk meratifikasi perjanjian internasional terkait ini, karena khawatir dengan beban pembiayaan besar yang harus ditanggungnya sendiri di kemudian hari, sebagai konsekuensi logis dari ratifikasi tersebut.

## II. Saran

Dari hasil penelitian perlu disarankan agar sikap pemerintah dalam menangani masalah imigran gelap harus tegas. Sikap yang selama ini yang tampak lunak dan seperti memberikan kenyamanan bagi para pelakunya harus segera diakhiri untuk menekan laju imigran gelap secara deras di masa depan. Sedangkan terhadap usulan ratifikasi konvensi internasional terkait oleh komisi DPR terkait, Komisi I terutama, perlu dipikirkan secara mendalam tingkat kesiapan dan segala konsekuensi yang akan dihadapi pemerintah Indonesia.

## Daftar Kepustakaan

### B u k u :

Dowell Myers. *Immigrants and Boomers: Forging A New Social Contracts for the Future of America*, Russell Sage Foundation, 2007.

Laham Nicholas. *Ronald Reagan and the Politics of Immigration Reform*. Praeger Publishers, 2000.

Lisa Magana. *Straddling the Border: Immigration Policy and the INS*, 2003.

Mae M Ngai. *Impossible Subjects: Illegal Aliens and the Making of Modern America*, 2004.

Vanessa B Beasley (Ed). *Who Belongs in America?: Presidents, Rhetoric, and Immigration*, 2006.

Tranaes T and Zimmermann, KF (Eds.), *Migrants, Work, and the Welfare State*, Odense, University Press of Southern Denmark, 2004.

Zimmermann, KF (ed), *European Migration: What Do We Know*, Oxford University Press, 2005.

### Surat Kabar:

Anak Agung Banyu Perwita, "Keamanan Nontradisional", *Kompas*, 13 Februari 2009

"Australia Rawat Intensif WNI Korban 'Ledakan'", *ANTARA*, 27 April, 2009.

"Dewan Setujui Protokol Menentang Penyelundupan," *Kompas*, 18 Februari 2009.

### Jurnal

GJ, Borjas. "The Economics of Immigration," *Journal of Economic Literature*, Volume 32, 1994.

### Internet

Marsha Mildon. "New UN protocols (against organized crime and Illegal immigrants", LawNow, [http:// www.highbeam.com/doc/1G1.3006-6003.html](http://www.highbeam.com/doc/1G1.3006-6003.html):1, 1 Pebruari 2001.

"Dua WNI Dijerat Penyelundupan Manusia di Australia," *Republika-Online*, 23 April 2009.

"47 Warga Asing Ditangkap," 26 April 2009, *Kompas-Online*.

"18 Imigran Gelap Kabur dari Rutan," *Kompas-Online*, 15 Januari 2009.

"Illegal Immigrants by Region", *Wikipedia*, [http://en.wikipedia.org/wiki/Illegal\\_immigrants](http://en.wikipedia.org/wiki/Illegal_immigrants), 13 Pebruari 2009: 7."

Indonesia Rawan Imigran Gelap," *Kompas-Online*, 9 April 2009. "Meledak, Kapal Kayu Milik WNI, Yang Mengangkut Pencari Suaka," *Republika-Online*, 17 April 2009.

